

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji data dan bukti empiris di lapangan melalui analisis *Analytical Hierarchy Process*, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha yang berada di Kabupaten Tanggamus sebagian besar berskala mikro yang dikelola perorangan dan bergerak di bidang akomodasi yaitu usaha penyedia makanan-minuman. *Pertama*, mayoritas lembaga-lembaga usaha mikro yang ada di sekitar Kabupaten Tanggamus merupakan usaha yang belum atau tidak *bankable*, yang disebabkan oleh desain atau model usaha yang belum berbasis proses bisnis formal. Hal ini mengakibatkan unit usaha pariwisata yang ada belum merasa pantas untuk bergabung dengan asosiasi atau mengajukan kredit untuk memperbesar kapasitas usahanya. *Kedua*, terlihat bahwa pelaku usaha pariwisata yang mengajukan kredit ke lembaga non-bank ternyata bukan unit usaha pariwisata dengan skala mikro, melainkan usaha skala kecil yang telah mengalami proses pengajuan kredit yang cukup lama. Mengutip pernyataan dari perwakilan lembaga keuangan bank dalam FGD, bahwa usaha-usaha yang semakin baik akan “naik kelas” sehingga tidak lagi masuk kepada usaha yang berhak untuk mendapatkan akses fasilitas KUR yang berbunga rendah. Fenomena di atas semakin meneguhkan kebutuhan akan pengembangan pariwisata terpadu dalam bentuk peningkatan kapasitas literasi keuangan para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tanggamus.
2. Berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha diantaranya kendala teknis seperti terbatasnya fasilitas umum; kendala ekonomi seperti terbatasnya pembeli dan daya beli; kendala sosial seperti belum optimal peran asosiasi/organisasi; serta kendala lingkungan terkait pengelolaan lingkungan dan sampah. Pelestarian lingkungan adalah isu yang penting, karena menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satu

faktor yang menyebabkan masih relatif rendahnya daya saing sektor pariwisata di Indonesia adalah masih rendahnya faktor *health and hygiene* (kesehatan dan kebersihan). Padahal kedua faktor tersebut sangat penting dalam upaya penerapan konsep pariwisata yang berkelanjutan. Terlebih lagi, Indonesia juga tengah gencar mengembangkan destinasi wisata berbasis alam (*ecotourism*), sehingga prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Kabupaten Tanggamus menjadi penting dan strategis untuk diimplementasikan.

Berdasarkan keempat kendala tersebut di atas, terlihat bahwa selain aspek teknis, ketiga aspek berikutnya sangat terkait dengan kualifikasi SDM yang mayoritas masih merupakan lulusan SMA sebagai faktor utama dalam dinamika wisata di Kabupaten Tanggamus ini.

3. Pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari analisis pendapatan yang menunjukkan pendapatan positif dalam semua jenis usaha dan rasio keuangan yang menunjukkan indikator positif dalam rasio lancar dan rasio likuiditas. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan efisiensi pengelolaan aset lancar agar kinerja keuangan yang dihasilkan lebih optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha secara signifikan adalah tingkat pendidikan, bentuk usaha, jenis usaha, skala usaha, lokasi, kemitraan, jarak tempat tinggal ke lokasi usaha, jumlah karyawan, besaran modal awal, sumber permodalan, akses finansial, adopsi teknologi dan partisipasi dalam organisasi.
4. Peningkatan pembiayaan pelaku usaha pariwisata memberikan dampak yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tanggamus terutama terhadap peningkatan PAD dan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengedepankan berkelanjutan untuk selanjutnya mengupayakan terpadu dan inklusif. Pendekatan (*driver*) utama berkelanjutan tersebut adalah melalui aspek infrastruktur dan teknologi dengan peningkatan konektivitas, baik secara fisik maupun sistem bisnis

antar destinasi wisata, yang diarahkan untuk menjalankan dua strategi utama berupa peningkatan kompetensi dan kualitas SDM serta kebijakan. Strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus bersumber dari kolaborasi pemerintah, dengan tetap membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi melalui skema KPBU, dan lembaga keuangan baik berupa Perbankan maupun Nonperbankan.

5.2 Implikasi Manajerial Secara Umum

Hasil dari penelitian ini akan berdampak secara manajerial dalam pariwisata Kabupaten Tanggamus yang berkelanjutan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis AHP, strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata yang diterapkan dalam pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus bertitik berat pada pemerintah. Pembiayaan dari pemerintah dapat mendorong tercapainya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang mana melalui berkelanjutan pembangunan tersebut akan tercipta pariwisata yang terpadu dan inklusif. Maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut dirumuskan sejumlah implikasi manajerial yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa faktor kebijakan merupakan pilihan yang menjadi landasan akhir dalam pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Kebijakan ini memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pengelolaan Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi wisata, langkah awal dalam perencanaan adalah memastikan keterpaduan diantara semua elemen pengelolaan. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan ini mencakup mulai dari kebijakan level pusat misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi kerangka kebijakan pengembangan

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kawasan beserta dukungan-dukungan kelembagaan lainnya; kemudian kebijakan level provinsi (peraturan gubernur) sebagai turunan dari PP itu dalam bentuk harmonisasi peraturan di level bawah daerah, termasuk regulasi penataan kawasan yang lintas daerah; dan kebijakan level Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengatur hal-hal yang terkait aturan-aturan teknis pengelolaan *stakeholders* pariwisata di tingkat lokal.

Untuk memastikan keterpaduan, kebijakan pengembangan pariwisata harus diwujudkan dalam suatu kerangka kerja yang: (1) mengakomodasi karakteristik spesifik dari setiap bagian kawasan pariwisata, baik dari sisi pelaku, wilayah, maupun usaha pariwisatanya; (2) memastikan keterkaitan secara sistemik (*systemic linkage*) diantara seluruh elemen dalam pengembangan sektor pariwisata; dan (3) memastikan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan pilar-pilar utama pariwisata, yang diantaranya adalah manusia dan daya dukung alam atau lingkungan sehingga tercipta suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam konteks akomodasi terhadap karakteristik spesifik dari wilayah pariwisata, maka kebijakan yang dijalankan harus mampu mendorong transformasi manusia, wilayah dan usaha pariwisata, dari kondisi awal menuju pada suatu tingkat kualitas dan kompetensi yang sejalan dengan meningkatnya kontribusi pariwisata pada kesejahteraan dan perekonomian.

Untuk memastikan keterkaitan secara sistemik diantara seluruh elemen, maka kebijakan yang diterapkan harus mewujudkan sinergi, baik diantara Pusat dan Daerah, maupun diantara *stakeholders* pariwisata lainnya sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang kondusif. Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan menuju pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, kebijakan yang dijalankan harus memastikan peningkatan kualitas kehidupan manusia dan daya dukung wilayah serta lingkungan seiring dengan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian.

Untuk itu, rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus seyogyanya dirumuskan dengan merujuk pada master plan pembangunan ekonomi di tingkat nasional yang telah dibangun sebelumnya yakni MP3EI 2011-2025. Hal ini karena MP3EI merupakan master plan yang telah fokus pada pembangunan

ekonomi secara berkelanjutan dan dirancang berkesinambungan antar periode pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah hanya perlu menyesuaikan *four-track strategy* pembangunan ekonomi (*pro growth, pro poor, pro jobs, and pro-environment*) yang telah dituangkan di dalam MP3EI dengan kondisi yang relevan dengan saat ini.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan keterpaduan, keberlanjutan dan inklusif di Kabupaten Tanggamus pemerintah juga perlu memperhatikan aspek 3C (*National Connectivity, Regional Cycle, dan Global Cycle*) plus faktor pendukung lainnya yang mencakup inovasi, teknologi dan kewirausahaan digital. Kebijakan 3C ini akan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia dan selaras dengan strategi *pro-growth*. Sebagai contoh penerapan 3C dalam lingkup Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut: (1) *Regional Cycle*, konektivitas antar wilayah di lingkup regional di Provinsi Lampung; (2) *National connectivity*, konektivitas antar destinasi wisata secara nasional seperti Jakarta - Palembang - Jambi; dan (3) *Global Cycle*, konektivitas dalam lingkup global, Indonesia - Malaysia - Singapura. Dengan demikian, terciptalah pariwisata Kabupaten Tanggamus yang terpadu dan dapat mendorong terjalannya keterpaduan dengan daerah dan destinasi lainnya.

Kerangka diatas tentunya perlu diperkuat dengan Kebijakan Tata Kelola pariwisata Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi wisata yang terpadu, berkelanjutan dan inklusif. Dalam Kebijakan Tata Kelola tersebut, perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengembangkan berbagai kerangka dan prosedur kerja yang lebih bersifat manajerial dan teknis. Salah satu gambaran implementasinya adalah prosedur kerja dengan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (*Clean, Healthy, Safety dan Environment*).

2. Sumber Daya Manusia

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas dan kompetensi SDM menempati prioritas kedua dalam strategi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Ini sejalan dengan hasil survei yang berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait SDM, diantaranya masih rendahnya keterampilan kompetensi dan kurangnya adaptasi terhadap tuntutan perubahan yang dihadapi oleh para

pelaku usaha. Sementara itu, di tingkat mikro, ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan pelaku usaha memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Oleh karena itu pembangunan SDM dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus menempati posisi yang sangat penting.

Salah satu fungsi penting pembangunan SDM adalah sebagai mekanisme untuk menjembatani kondisi tingkat pendidikan masyarakat dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat. Berdasarkan hasil survei dalam penelitian ini, salah satu karakteristik yang menonjol dari masyarakat, terutama para pelaku usaha pariwisata adalah dalam hal struktur pendidikan, dimana profil pelaku usaha didominasi lulusan SMA (53,54 persen), SMP (15,75 persen), namun untuk lulusan Sarjana masih rendah (11,02 persen). Sementara itu, profil usahanya didominasi oleh usaha mikro-kecil perorangan yang bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman.

Dalam kerangka pengembangan sektor pariwisata yang terpadu, berkelanjutan dan inklusif, maka pembangunan SDM perlu diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM terutama para pelaku usaha agar kinerja usahanya meningkat dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan SDM harus dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan para pelaku usaha pariwisata, salah satunya untuk membangkitkan rasa nyaman dan minat wisatawan. Selain itu, pembangunan SDM juga harus bisa mengaktifkan mekanisme kaderisasi diantara masyarakat atau pelaku usaha, sebagai salah satu cara internal untuk memastikan keberlanjutan suatu unit usaha pariwisata.

Untuk ini, pembangunan SDM diatas dapat dijalankan dengan beberapa pendekatan dan program sebagai berikut:

1. Mendirikan sekolah tinggi pariwisata dengan kurikulum kewirausahaan atau *entrepreneurship* yang memberikan kapasitas dalam hal pengelolaan (manajemen), keuangan dan teknis lainnya. Bentuk lembaga disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dengan penguatan kurikulum melalui integrasi dengan tata nilai kepariwisataan, aspek teknologi, *entrepreneurship*, serta

hospitality sehingga dapat membentuk pelaku usaha dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan usaha pariwisata.

2. Menjalankan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara informal juga penting dikembangkan dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang melatih keahlian dan peningkatan keterampilan yang diperlukan di sektor pariwisata. Hal ini dilakukan dengan melibatkan akademisi, praktisi, para ahli (*expertise*) baik dari dalam maupun luar negeri yang berpengalaman di bidang terkait.
3. Mengembangkan inkubator bisnis sebagai sarana pelatihan dan percontohan bagi berbagai inisiatif kegiatan usaha. Inkubator bisnis ini juga dapat dilengkapi dengan proses adopsi teknologi untuk memicu dan memfasilitasi proses kreativitas, adaptasi dan inovasi di kalangan pelaku usaha. Selain itu, inkubator bisnis dan teknologi untuk UMKM juga diarahkan untuk memacu pelaku usaha untuk lebih inovatif, kreatif dan adaptif.
4. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pada para pelaku usaha dan masyarakat secara umum, terkait: (a) kesadaran atas pentingnya keberlanjutan lingkungan; (b) penumbuhan karakter sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan (c) kesadaran atas pentingnya penerapan protokol kesehatan yang baik dan mekanisme pelaksanaan mitigasi risiko di lokasi wisata.

Pendekatan dan program formal maupun non-formal tersebut perlu didukung oleh strategi pembiayaan yang terpadu dan kolaboratif, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pemerintah melalui APBN/APBD untuk pengembangan lembaga-lembaga diklat pemerintah atau sekolah tinggi pariwisata; pemberian insentif seperti pajak dan subsidi untuk inisiatif swasta; serta dukungan untuk pengembangan pendidikan kepariwisataan dan *entrepreneurship*.
- b. Pembiayaan dari swasta dilakukan sebagai investasi untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Swasta untuk pembangunan dan pengembangan

pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat atau pelaku usaha; dan dukungan dalam pembiayaan program magang pada kegiatan bidang pariwisata.

- c. Pembiayaan melalui KPBU dapat diaktifkan untuk pendirian Balai Latihan Kerja dan Inkubator Bisnis; serta bentuk kerjasama pemerintah-swasta lainnya untuk mendukung kegiatan *sharing* profesi para ahli untuk berbagi pengalaman.
- d. Perbankan dapat mendirikan lembaga pendidikan finansial untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat; dan mendukung pengembangan keterampilan finansial untuk membangun SDM yang kompeten.
- e. Perusahaan non-bank dapat membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan melalui perjanjian sewa guna usaha pendidikan dan pelatihan.

Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, tentunya diperlukan kerjasama atau sinergi diantara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu pemerintah dari level pusat, daerah, sampai pada satuan pemerintahan terkecil di tingkat lokal; masyarakat; sektor swasta; dan yang lainnya. Kedepan, diharapkan dalam proses pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas SDM, membentuk karakter dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, implikasi manajerial terkait pembangunan SDM sejalan dengan penerapan strategi *pro jobs*.

3. Infrastruktur dan Teknologi

Dalam penelitian ini, infrastruktur dan teknologi merupakan pilihan yang menjadi landasan utama dalam pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan di Kabupaten Tanggamus yang berfokus terkait pembangunan infrastruktur. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa saat ini memang sangat membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur terutama fasilitas umum dan air bersih, sesuai dengan hasil temuan kendala teknis yang dihadapi para pelaku usaha. Pembangunan infrastruktur yang saat ini berupa pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas umum, teknologi dan lain sebagainya harus dapat berkelanjutan dalam jangka panjang, tidak berhenti di tengah jalan.

Pembangunan infrastruktur juga seharusnya diupayakan sebagai sarana bagi kontribusi pariwisata yang optimal pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tersebut harus: (1) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal, terutama para pelaku usaha pariwisata yang didominasi oleh UMKM; dan (2) tetap memastikan keberlangsungan lingkungan dan kualitas dari wilayah atau destinasi yang menjadi lokasi usaha masyarakat.

Dalam rangka itu, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan aspek-aspek strategi sebagai berikut:

- a. Infrastruktur untuk mendukung pengembangan kualitas SDM, meliputi infrastruktur pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal yang memiliki kesesuaian dengan karakteristik pelaku usaha (UMKM); pengembangan lembaga-lembaga diklat seperti sekolah tinggi pariwisata, balai latihan kerja dan inkubator bisnis. Dalam konteks pandemi serta keterbatasan lainnya, maka infrastruktur tersebut perlu dikembangkan untuk mengakomodasi cara-cara komunikasi baru yang lebih adaptif.
- b. Infrastruktur untuk mendukung konektivitas fisik dan sistem bisnis, yaitu infrastruktur untuk pengaturan zonasi usaha serta fasilitas dasar pada zona-zona usaha pariwisata. Sebagai contoh, pembangunan sentra penjualan produk-produk UMKM merupakan salah satu solusi bagi kendala yang dihadapi para pelaku usaha terkait lokasi usaha yang kurang strategis, sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam operasional usahanya, serta menghasilkan kinerja dan pendapatan yang lebih optimal. Infrastruktur lainnya yakni infrastruktur *hardware dan software*; infrastruktur untuk mendukung konektivitas seperti jalan, jembatan, perangkat jaringan internet; dan infrastruktur penyediaan fasilitas dasar di destinasi wisata. Dalam konteks konektivitas, infrastruktur rantai pasok (*supply-chain*) juga sangat penting untuk mengoneksikan sentra produsen dan sentra konsumen, antar pelaku usaha, baik antar sesama UMKM; maupun antara UMKM dan usaha besar; lintas sektor usaha; dan antar pelaku usaha pariwisata dengan konsumen atau wisatawan.

- c. Infrastruktur untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan ekologis, yaitu infrastruktur atau fasilitas dasar pelestarian lingkungan seperti pembangunan sarana air bersih (SAB) serta instalasi pengolahan limbah dan sampah. Kondisi eksisting di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan hal tersebut masih belum memadai dan merupakan bagian dari kendala utama yang dihadapi para pelaku usaha. Selain itu diperlukan pula infrastruktur yang dapat menyangga kondisi ekologis destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya. Keberadaan infrastruktur tersebut dapat menjamin keberlanjutan lingkungan sekitar di daerah pariwisata yang merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan *ecotourism* dan merupakan bagian dari strategi *pro-environment*.
- d. Infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing pariwisata, yaitu infrastruktur untuk yang dapat memfasilitasi pendampingan dalam proses investasi terpadu melalui pelayanan satu pintu; dan infrastruktur yang menyangga kenyamanan dan keamanan masyarakat dan wisatawan di destinasi wisata dan zona usaha seperti air bersih, jaringan gas kota, tempat pembuangan sampah (TPS), drainase dan lain-lain.
- e. Infrastruktur untuk mendukung akses keuangan dan partisipasi masyarakat, yaitu infrastruktur untuk memfasilitasi bantuan keuangan bagi pelaku usaha yang memiliki inisiatif khusus dan insentif bagi perbankan untuk memperluas akses keuangan pelaku usaha pariwisata.
- f. Infrastruktur untuk mendukung pengembangan teknologi, yaitu infrastruktur untuk fasilitasi pengembangan dan adopsi teknologi seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti teknologi *5G; fiber optic; big data; cloud computing*. Kebutuhan *big data* pariwisata ini merupakan hal yang penting, karena realitanya selama penelitian berlangsung terdapat kesulitan tersendiri untuk menemukan data yang valid dan akurat untuk memahami dan menganalisis profil pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Pembentukan *big data* ini akan menyediakan berbagai data *real time* mulai dari perilaku wisatawan, perilaku pelaku usaha, kapasitas usaha, pola pengeluaran konsumsi

pariwisata, sampai kepada pola perilaku wisatawan terhadap destinasi. Sehingga pemangku kepentingan bisa membaca data ini dan merespon hal-hal yang nampak dari suatu peristiwa pada destinasi. Pengembangan infrastruktur teknologi juga perlu diikuti dengan upaya sistematis untuk melakukan peningkatan adopsi teknologi. Hal ini akan membantu mengatasi salah satu kendala yang menjadi temuan penelitian ini, yaitu kondisi eksisting pemanfaatan teknologi yang masih cenderung rendah. Produk nyatanya dapat berupa teknologi pendukung tanpa sentuhan (*touchless transaction*) untuk kebutuhan pemasaran, pembayaran, administrasi dan pelacakan (*tracking*) juga perlu dikembangkan seperti *ecommerce*, *e-tourism*, *e-payment*, *e-wallet*, *e-ticketing*, *e-maps* dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, adopsi teknologi yang ideal akan bergerak dari penyediaan hak dasar telekomunikasi melalui wifi dan jaringan internet yang baik, dilanjutkan dengan penggunaan teknologi masa depan (*future tech*) seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotik dan otomasi-otomasi pelayanan kepariwisataan lainnya yang mempermudah kegiatan usaha dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam hal pelayanan pada kepentingan masyarakat lokal dan wisatawan, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur dan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini terjadi. Tersedianya infrastruktur dan teknologi yang memadai juga dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan berdampak pada kunjungan wisatawan.

Pemerintah berperan penting dalam menetapkan regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi. Kemudian pihak swasta juga berperan dalam melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur atau inovasi teknologi pariwisata tersebut. Masyarakat dapat dilibatkan melalui sosialisasi penggunaan infrastruktur dan teknologi untuk memperluas partisipasi masyarakat lokal. Terakhir, wisatawan juga berperan penting dalam memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang tersedia serta memanfaatkan penggunaan teknologi

dalam membagikan (*share*) cerita dan pengalaman mereka dalam berwisata di Kabupaten Tanggamus.

Dalam rangka hal diatas, diperlukan peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) harus diberikan ruang yang cukup untuk mengakses data-data pariwisata secara proporsional di Kabupaten Tanggamus. Idealnya, model kemitraan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tanggamus adalah ABCG (*Academician, Business, Community, Government*) seperti yang tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1
Kerangka kemitraan pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Tanggamus

Agensi	Peran	Keterangan
Akademisi	Menggali, merumuskan dan mengembangkan secara kreatif potensi wisata destinasi wisata, baik alam, budaya dan wisata buatan lainnya	Secara permanen harus ada <i>taskforce</i>
Bisnis	Menerjemahkan hasil kerja kalangan akademisi dan mengimplementasikannya dalam proyek pengembangan pariwisata bersama pemerintah (<i>government</i>)	Berkolaborasi dengan berbagai pihak
Pemerintah	Mengeluarkan kebijakan yang memastikan setiap proyek kreatif wisata yang digali dan dikembangkan oleh Akademisi dan Pebisnis memiliki jangkar regulasinya.	Regulasi di setiap level harus siap
Komunitas	Mitra untuk memperkuat dan mengembangkan destinasi wisata agar mereka tidak menjadi marginal justru menjadi aktor utama dalam sistem pariwisata	Keahlian dasar dan menengah didorong secara aktif.

4. Pembiayaan dan Investasi

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan publik yang bersumber dari pemerintah merupakan prioritas utama dalam pengembangan Kabupaten Tanggamus. Pembiayaan dari pemerintah selain difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, juga diperlukan untuk pembangunan pariwisata secara menyeluruh. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan destinasi wisata baik berupa APBN, APBD, DAK Fisik Pariwisata, dan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Mengingat pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus untuk mencapai kondisi idealnya memerlukan anggaran yang cukup besar, maka pemerintah perlu berperan untuk mampu mendorong

perkembangan sumber investasi lainnya. Pemerintah harus berperan lebih utama pada penempatan dan pola pembiayaan yang efektif, sehingga mampu menginisiasi dan menggerakkan sumber-sumber pembiayaan lain secara proporsional melalui berbagai skema untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tanggamus. Selain itu, pemerintah dapat berfokus pada kebijakan pembiayaan UMKM yang merupakan pelaku usaha mayoritas di destinasi wisata tersebut untuk mencegah terjadinya kegagalan kompetisi antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Penerapan kebijakan yang memberikan fokus terhadap pembiayaan UMKM tentunya akan membawa manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat. Kebijakan pembiayaan oleh pemerintah dapat berimplikasi pada penurunan ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagai bentuk implementasi strategi *pro poor* untuk keadilan sosial di tengah masyarakat. Dukungan pembiayaan oleh pemerintah terhadap UMKM juga selaras dalam kebijakan inklusif pada pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanggamus tersebut.

- b. Peningkatan investasi swasta, baik yang bersifat PMA maupun PMDN, juga diperlukan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Meski pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan investasi tersebut, namun tentunya diperlukan alternatif sumber pembiayaan lainnya. Pembiayaan ini dapat bersumber dari swasta melalui mekanisme kerjasama yang ada. Pelibatan investor swasta dalam pembangunan destinasi wisata juga bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang tetap kompetitif dan dapat mengakselerasi pembangunan pariwisata. Dengan demikian, dapat diwujudkan tambahan investasi yang terpadu dan merata yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- c. Selanjutnya, diperlukan penguatan peran lembaga dan pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan seperti koperasi, perusahaan gadai dan perusahaan *multifinance*. Peran lembaga keuangan tersebut perlu ditingkatkan seiring dengan pembangunan pariwisata dan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat sekitar yang saat ini masih tergolong rendah. Perbankan dapat memberikan layanan

pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak seperti KUR, maupun fasilitas kredit lainnya seperti Kredit Modal Kerja; Kredit Investasi; Kredit Pariwisata. Lembaga keuangan non perbankan perlu didorong untuk dapat menyediakan layanan inovatif *financial technology*, seperti *peer to peer lending (P2P lending)* yang fokus pada pelaku usaha yang belum *bankable* sehingga dapat memudahkan dan mendekatkan pelaku UMKM dalam mengakses produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan dalam mengajukan pembiayaan juga perlu ditingkatkan dan diformulasikan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan literasi keuangan pelaku usaha agar minat pelaku usaha muncul dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga tersebut.

- d. Mengingat kapasitas produksi dan kebutuhan pendanaan yang berbeda, tentunya unit usaha dengan skala yang berbeda membutuhkan akses pembiayaan yang berbeda pula. Sebagai contoh, unit usaha skala menengah dan besar dapat memanfaatkan program pembiayaan dalam bentuk fasilitas kredit usaha komersial perbankan yang memberikan plafon pinjaman dengan jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah atau lebih. Di sisi lain, pelaku usaha berskala mikro dan kecil tentunya akan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas kredit usaha komersial perbankan. Lebih jauh lagi, kapasitas produksi usaha skala mikro-kecil tentunya tidak sanggup untuk mengelola pinjaman dengan jumlah ratusan juta dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya usaha skala mikro dan kecil mendapatkan fasilitas kredit lunak seperti fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sembari memperluas akses keuangan, meningkatkan jumlah plafon dan mempermudah persyaratan pengajuan kredit bagi pelaku usaha. Kerangka pembiayaan berdasarkan skala usaha dipetakan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5. 2
*Kerangka pembiayaan untuk pelaku usaha berdasarkan skala usaha
 di Kabupaten Tanggamus*

Skala usaha	Model pembiayaan	Jenis pembiayaan prioritas
Besar	Kredit komersil lunak	Pengembangan destinasi baru
Menengah	Kredit lunak	<i>Supplier</i> kebutuhan pengembangan destinasi, hotel dan sebagainya
Kecil	KUR	Jasa wisata, pengembangan <i>craft</i> , komunitas budaya, dll.
Mikro	KUR	Peningkatan modal usaha kuliner dan sebagainya

5.2.1 Implikasi pada Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Tanggamus dalam bentuk naskah akademik yang dijadikan acuan pengembangan masyarakat dalam destinasi wisata. Strategi pembiayaan pelaku usaha pariwisata untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal diwujudkan melalui penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal pada industri pariwisata dan kemudahan pemberian izin usaha bagi masyarakat lokal yang ingin berwirausaha. Sehingga tidak muncul kekhawatiran bahwa penguatan sektor pariwisata akan memarjinalkan masyarakat lokal yang sejatinya menjadi penerima manfaat utama dari pengembangan destinasi wisata. Pengembangan destinasi wisata tentunya harus mampu memberikan surplus ekonomi kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan terutama bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan menjadikan UMKM sebagai mitra utama pariwisata di Kabupaten Tanggamus yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas UMKM ini, maka pemerintah, masyarakat lokal dan destinasi wisata tersebut akan menjadi subyek dan objek yang diuntungkan. Pada aspek pemerintah, program peningkatan kesejahteraan akan terlihat menyeluruh karena melibatkan pelaku yang besar; untuk masyarakat, aspek *engagement* pada program yang ada di destinasi wisata menjadi tampak dan terasa; sedangkan pada aspek destinasi itu

sendiri dengan model partisipasi yang luas tetapi berkualitas, maka keberlangsungan akan terjaga.

Perspektif inklusif dari pengembangan destinasi juga diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, namun sebagai subjek yang turut berperan dan berpartisipasi di dalam pembangunan daerah. Pengembangan Kabupaten Tanggamus ini nantinya tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Pusat dalam bentuk devisa dan penerimaan negara, namun juga dapat berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan pengembangan SDM, serta kualitas hidup melalui pelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas SDM yang akan memberikan kepastian terhadap situasi di lapangan serta mendorong penerapan kebijakan pro-rakyat dan pro-UMKM yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek inklusif.

Terdapat beberapa implikasi praktis berupa kebijakan pro-rakyat yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Penguatan organisasi *civil society* yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di sektor pariwisata. Organisasi ini penting menjadi mitra penyeimbang pemerintah dan pengelola destinasi agar bisa saling memperhatikan, mengkritisi dan memperkuat sistem pengelolaan destinasi wisata. Dalam konteks dinamika destinasi wisata, organisasi *civil society* juga memiliki peluang untuk menampilkan pola relasi antar pemangku kepentingan secara adil, berimbang dan demokratis. Sehingga masing-masing pihak dapat bersatu padu dalam membangun kesejahteraan bersama.
- b. Memperluas aspek pelibatan masyarakat di sentra-sentra khusus destinasi. Sebab dengan menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi wisata, maka akan berpotensi menimbulkan ketegangan, baik ketegangan antar kelompok sosial, maupun ketegangan antar budaya. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dan terukur agar bisa ditransformasikan menjadi energi positif untuk peningkatan kualitas pariwisata. Pelibatan ini harus

dapat dikelola secara *manageable*, sistematis dan terukur agar memberikan implikasi sosial politik yang diharapkan. Peningkatan kesempatan kerja melalui pembangunan sektor pariwisata harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat lokal.

- c. Penguatan kualitas SDM pariwisata merupakan suatu keniscayaan agar peluang-peluang potensial yang berhubungan dengan wisata seperti usaha-usaha berbasis wisata, maupun ragam usaha penyangganya, dapat dikerjakan oleh masyarakat lokal dan terintegrasi dengan sistem kepariwisataan yang sedang dikembangkan.

Selanjutnya, kebijakan pro-UMKM untuk meningkatkan kualitas pariwisata lokal lainnya, baik yang terintegrasi dengan destinasi wisata maupun yang tidak diantaranya mencakup:

- a. Perluasan plafon KUR untuk pelaku UMKM agar dapat meningkatkan skala usahanya.
- b. Pemberdayaan bisnis melalui pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- c. Permudahan izin beroperasi bagi pelaku usaha pariwisata demi meningkatkan aksesibilitas pelaku pada sumber pembiayaan.
- d. Penguatan kemitraan dan organisasi atau asosiasi usaha melalui insentif bagi usaha besar untuk melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM dan peningkatan kualitas kelembagaan asosiasi usaha pariwisata.
- e. Proses peningkatan kualitas ini dapat dimulai dengan melakukan dialog inter subjektif yang melibatkan berbagai pihak yang terkait langsung dan tidak langsung dengan untuk menghasilkan kesadaran bersama di antara pelaku maupun pengelola destinasi wisata.

5.2.2 Implikasi Ilmiah

Hasil penelitian ini berdampak secara ilmiah terutama dalam pariwisata berkelanjutan untuk Kabupaten Tanggamus. Secara ilmiah, penelitian ini menghasilkan strategi pembiayaan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat dalam

mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan beberapa teori untuk diaplikasikan di sektor pariwisata. Dari sisi metodologi, penelitian ini memperkaya khazanah dalam penggunaan analisis AHP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menghasilkan beberapa temuan utama yang mendukung teori dan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian sebelumnya, studi ini juga menghasilkan beberapa temuan yang belum diungkap pada studi-studi sebelumnya sehingga menambah khazanah literatur tentang studi-studi pembiayaan sektor pariwisata di Indonesia. Penggunaan metode yang dihasilkan dari FGD dan para pakar ini juga diharapkan dapat diterapkan untuk permasalahan serupa, terutama pariwisata berkelanjutan di daerah yang memiliki kemiripan karakteristik dengan Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan interaksi usaha mikro, kecil dan menengah dengan lingkungan bisnisnya yang saat ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, terutama bagi para pelaku UMKM yang berada di destinasi wisata. Penelitian ini juga menganalisis dan memetakan bagaimana kinerja keuangan para pelaku UMKM yang berada di destinasi wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menunjukkan kaitan antara pembangunan wilayah dengan kinerja UMKM, terutama di bidang pariwisata.

Penelitian ini juga berupaya menyajikan pembahasan di Kabupaten Tanggamus secara komprehensif, dimulai dari ruang lingkup mikro di lapangan yakni pelaku usaha pariwisata, pembahasan level makro regional di tingkat Kabupaten Tanggamus, hingga temuan tersebut dibawa ke level makro nasional dengan perumusan strategi yang melibatkan para pemangku kebijakan. Pada akhirnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi ini berhasil menghasilkan data primer melalui pemetaan terhadap pelaku usaha pariwisata yang berada di Kabupaten Tanggamus. Pemetaan ini seyogyanya dapat terus dilanjutkan melalui penguatan *Big Data*. Pemanfaatan *Big Data* pariwisata akan memudahkan dalam pemetaan berbagai data terkait pariwisata sehingga para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data tersebut untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Tanggamus. Dengan pengembangan berbasis data yang komprehensif, akan menciptakan sistem ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan inovasi dan keterpaduan.
2. Studi ini menemukan bahwa kinerja keuangan para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus cukup baik, namun terdapat inefisiensi dalam pengelolaan keuangannya. Inefisiensi kinerja keuangan ini muncul dalam bentuk rasio lancar yang terlalu tinggi. Hal ini berarti bahwa aset lancar yang dimiliki pelaku usaha tidak bergerak atau diam saja dan tidak berkontribusi dalam memberikan penerimaan, baik secara aktif maupun pasif. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan dari pelaku usaha pariwisata untuk menghindari risiko (*risk averse*) sehingga meningkatkan jumlah aset lancar sebagai penyangga (*buffer*) dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kinerja finansial usaha, terutama dalam pengelolaan aset lancar agar pelaku bisnis dapat meningkatkan tingkat pendapatan secara optimal.
3. Studi ini menemukan bahwa kinerja pendapatan pelaku usaha pariwisata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, seperti karakteristik usaha (bentuk usaha, jenis usaha, skala usaha, lokasi, jarak tempat tinggal ke lokasi usaha, jumlah karyawan, besaran modal awal, sumber permodalan) dan kompetensi pelaku usaha (tingkat pendidikan), namun juga beberapa faktor eksternal, seperti akses finansial, dukungan teknologi, kemitraan dan keberadaan organisasi kepariwisataan. Fakta ini mengindikasikan bahwa *policymaker* dapat memainkan peranan melalui dukungan instrumentasi

Fariz Fardani Nurbaihaqi, 2023

STRATEGI PEMBIAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus melalui penguatan akses finansial, dukungan teknologi, penguatan organisasi kepariwisataan, penguatan kemitraan dan penguatan kompetensi bisnis pelaku usaha. Hal ini penting karena pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus ke depan, idealnya tidak hanya sekedar diarahkan pada aspek-aspek pembangunan fisik seperti infrastruktur dan *amenities* semata, tetapi juga pada aspek-aspek non fisik strategis, seperti pembangunan sumber daya manusia terutama pelaku usaha pariwisata dan pengembangan usahanya.

4. Studi ini juga menemukan bahwa kebijakan penguatan sektor pariwisata melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap wisatawan, peningkatan investasi, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah untuk pariwisata dan budaya dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan Kabupaten Tanggamus. Di antara determinan tersebut, investasi memberikan kontribusi paling signifikan bagi peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDRB dan pengurangan kemiskinan. Fakta ini menyarankan kepada *policymaker* untuk dapat memperkuat investasi di destinasi pariwisata, terutama di Kabupaten Tanggamus. Hal ini penting dan strategis dalam upaya akselerasi perekonomian daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diperlukan, baik dalam jumlah maupun alokasi pembiayaan, serta dukungan lainnya yang akuntabel.
5. Studi ini berhasil merumuskan bahwa Kabupaten Tanggamus perlu diletakkan dalam kerangka keberlanjutan dengan selanjutnya mengupayakan keterpaduan dan inklusif. Untuk memastikan keterkaitan secara sistemik diantara seluruh aspek tersebut, maka diperlukan kebijakan yang terpadu, berkelanjutan dan inklusif sehingga kebijakan yang diterapkan mampu mewujudkan sinergi, menciptakan manfaat optimal bagi masyarakat lokal serta memastikan peningkatan kualitas kehidupan manusia dan daya

dukung wilayah/lingkungan seiring dengan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan.

Meski studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dalam menjawab tujuannya, namun masih terdapat ruang untuk mengembangkan penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan berfokus pada sisi permintaan (*demand side*) yang mencakup masyarakat non-pelaku usaha pariwisata dan para wisatawan. Dengan adanya penelitian yang juga berfokus pada sisi permintaan (*demand side*), diharapkan dapat memperkuat rumusan kebijakan pengembangan Kabupaten Tanggamus yang lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan respons yang tepat terhadap perubahan dalam permintaan sehingga terjadi keseimbangan antara sisi penawaran (*supply-side*) dengan sisi permintaan (*demand-side*), agar pengembangan sektor pariwisata lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian yang dapat melihat keterkaitan atau kontribusi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk keterkaitannya dengan rumah tangga, pelaku usaha dan pemerintah. Salah satu metode yang dapat dipertimbangkan adalah *Social Accounting Matrix* (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kaidah ilmiah, dengan mengkombinasikan data sekunder yang relevan serta data primer yang diperoleh melalui observasi terhadap *stakeholders* yang terlibat dan diperkuat dengan pendapat para pakar serta pemangku kebijakan. Namun demikian, setidaknya masih terdapat 2 (dua) keterbatasan utama yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, pada level mikro, penelitian ini hanya berfokus kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus dan secara khusus tidak mengobservasi perilaku masyarakat setempat yang bukan merupakan pelaku usaha pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengamati perilaku para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tanggamus. Hal ini mengakibatkan hasil dari studi cenderung berfokus

pada sisi penawaran (*supply-side*), yakni dari sisi para pelaku usaha pariwisata. Secara khusus, studi ini belum memperhatikan sisi permintaan (*demand-side*), yakni dengan mengamati sisi perilaku para wisatawan yang berkunjung.

Kedua, pada level makro, studi ini menggunakan data makro regional di tingkat Kabupaten Tanggamus untuk menelaah estimasi pengaruh dari pariwisata dan kebijakan di level regional terhadap kesejahteraan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor-sektor perekonomian dapat memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk sektor pariwisata. Bahkan sektor pariwisata merupakan sektor yang terbilang cukup banyak melibatkan sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga, korporasi dan pemerintah. Studi ini secara khusus belum mendalami aspek keterkaitan antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor lainnya tersebut.